




ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

	NOMOR SOP	90 Tahun 2016
	TANGGAL PENGESAHAN	31 Agustus 2016
	TANGGAL REVISI	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum  Rini Agustiani NIP: 19660818 199203 2 001
	NAMA SOP	PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG KEARSIPAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.		<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan tentang teori kearsipan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.2. Mengetahui fungsi dan tugas unit kerja.3. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penandatanganan Rancangan Undang-Undang		<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja ANRI.2. Peraturan Perundang-undangan.3. Komputer/Printer/Scanner.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Rapat koordinasi pembahasan antar kementerian memerlukan waktu yang lama karena menyesuaikan jadwal dari masing-masing instansi yang terkait sehingga mengakibatkan pembahasan RUU berlangsung lama.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

